

## Strategi Kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam Mewujudkan Akses Sanitasi Aman Menuju Lingkungan Sehat Tahun 2029

Rakhmat Hardiyansyah<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah, Politeknik Bina Persada Cirebon, Jawa barat, Indonesia

e-mail : [rakhmat.hardi@gmail.com](mailto:rakhmat.hardi@gmail.com)

### Abstrak

Sanitasi aman merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kota Cirebon menghadapi tantangan signifikan berupa ketimpangan akses sanitasi, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan akses sanitasi aman menuju lingkungan sehat tahun 2029. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif mencakup lima dimensi utama menurut kerangka *Collaborative Governance*, yaitu: dialog tatap muka melalui forum multipihak, peningkatan kepercayaan masyarakat melalui program sanitasi berbasis komunitas, komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran, terbentuknya pemahaman bersama melalui edukasi berbasis komunitas, serta capaian sementara berupa peningkatan kepemilikan septic tank kedap dan penurunan kasus diare. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kolaboratif merupakan pendekatan efektif dalam percepatan pencapaian SDGs poin 6 (*Clean Water and Sanitation*). Namun demikian, keterlibatan sektor swasta, diversifikasi pembiayaan, serta edukasi berkelanjutan masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program sanitasi di Kota Cirebon.

**Kata Kunci:** strategi kolaboratif, sanitasi aman, *collaborative governance*, Kota Cirebon, lingkungan sehat.

## *Cirebon City Government's Collaborative Strategy in Realizing Safe Sanitation Access Towards a Healthy Environment by 2029*

### Abstract

*Safe sanitation is a fundamental prerequisite for achieving sustainable development and improving community quality of life. Cirebon City faces significant challenges such as unequal access to sanitation, limited institutional capacity, and low private sector involvement in service provision. This study aims to analyze the collaborative strategies of the Cirebon City Government in achieving safe sanitation access toward a healthy environment by 2029. A descriptive qualitative method was applied, using in-depth interviews, observations, and document analysis, followed by thematic data analysis. The findings indicate that the collaborative strategy is implemented through five key dimensions of Collaborative Governance: face-to-face dialogue in multi-stakeholder forums, trust building through community-based sanitation programs, government commitment in budget allocation, shared understanding fostered through community education, and intermediate outcomes such as increased ownership of sealed septic tanks and reduced diarrhea cases. The study concludes that collaborative strategy is an effective approach to accelerate the achievement of SDG 6 (Clean Water and Sanitation). Nevertheless, strengthening private sector engagement, diversifying financing mechanisms, and sustaining community education are crucial to ensure the long-term success of sanitation programs in Cirebon City.*

**Keywords:** *collaborative strategy, safe sanitation, collaborative governance, Cirebon City, healthy environment.*

### A. PENDAHULUAN

Sanitasi yang aman merupakan elemen fundamental dalam pembangunan kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022) menekankan bahwa sanitasi aman tidak hanya menyangkut kebersihan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan pengurangan beban penyakit menular, penurunan angka kematian anak, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sanitasi aman juga berkontribusi signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya target 6.2 tentang akses universal terhadap sanitasi dan higiene yang memadai dan adil pada tahun 2030.

Di Indonesia, persoalan sanitasi masih menjadi tantangan struktural yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sekitar 12,2% penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak, dan sebagian besar dari angka ini berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta mereka yang tinggal di kawasan padat dan marginal (Fadhlurrohman et al., 2021). Ketimpangan akses antar wilayah menjadi tantangan serius dalam perencanaan pembangunan, baik secara horizontal antar daerah maupun vertikal dalam lingkup internal perkotaan (Wahyuni et al., 2020).

Kota Cirebon sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Barat mengalami tantangan yang khas dalam penyediaan layanan sanitasi. Meskipun memiliki ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif lebih baik dibandingkan

daerah sekitarnya, namun terdapat ketimpangan antar wilayah kelurahan, khususnya di daerah dengan kepadatan tinggi, lingkungan kumuh, dan sempadan sungai. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Cirebon (Dinas Kesehatan, 2023), tercatat bahwa hanya 78,4% rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas jamban sehat, dan lebih dari 40% limbah domestik belum diolah secara aman. Sementara itu, target pemerintah dalam dokumen RPJMN 2020–2024 dan SDGs menuntut tercapainya akses sanitasi aman secara universal yang tentunya membutuhkan strategi percepatan yang kolaboratif dan inovatif.

Secara empiris, beberapa permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya pada aspek teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut lemahnya tata kelola lintas sektor dan keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah (Taryono et al., 2025; Afandi et al., 2024; Anggraeni et al., 2023). Tantangan klasik seperti fragmentasi kelembagaan antar OPD, minimnya data yang terintegrasi, serta rendahnya keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan monitoring menjadi penghambat signifikan. Dalam kerangka administrasi publik modern, isu sanitasi tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur—pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh (Emerson et al., 2012a) memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dinamika kolaborasi dalam tata kelola publik. Kolaborasi yang efektif dicirikan oleh adanya *shared motivation*,

*joint capacity*, dan *principled engagement* yang saling memperkuat dalam membangun solusi bersama. Studi oleh (Purnomo et al., 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sanitasi di berbagai daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana koordinasi lintas sektor dilakukan secara sistematis dan berbasis pada komitmen bersama antar aktor.

Lebih lanjut, (Susanthi & Yanuar Purwanto, 2018) mengemukakan bahwa penguatan kapasitas UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), kemitraan dengan masyarakat melalui program IPAL Komunal, serta integrasi program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) menjadi elemen strategis dalam penguatan sistem sanitasi perkotaan. Namun demikian, tanpa adanya mekanisme kolaboratif yang terstruktur, praktik kolaborasi seringkali bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan.

Di Kota Cirebon sendiri, beberapa inisiatif telah dilakukan seperti program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pembangunan IPAL Domestik, dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Namun demikian, tantangan koordinasi antar aktor dan lemahnya integrasi data serta perencanaan lintas sektor masih menjadi hambatan struktural. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi kolaboratif yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka mewujudkan akses sanitasi aman menuju lingkungan sehat tahun 2029. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk kolaborasi antar aktor, mekanisme koordinasi, hambatan yang dihadapi, serta potensi penguatan tata kelola kolaboratif berbasis prinsip *good governance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur kolaborasi tata kelola lokal serta kontribusi praktis dalam merumuskan

kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sistem layanan sanitasi di daerah.

### B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan strategi kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan akses sanitasi aman menuju lingkungan sehat tahun 2029. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali dinamika kebijakan dan pola interaksi antar-aktor secara mendalam dan kontekstual (Creswell John W., 2014). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat pemerintah, mitra LSM, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam program sanitasi. Observasi partisipatif dan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta regulasi daerah turut digunakan sebagai pelengkap data.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan merujuk pada tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut (Miles Matthew B., 2014). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika, termasuk informed consent dan jaminan kerahasiaan identitas informan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam penguatan kolaborasi lintas sektor menuju pencapaian target sanitasi aman di Kota Cirebon.

### C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa meskipun cakupan layanan sanitasi di Kota Cirebon mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, masih terdapat ketimpangan akses di kawasan permukiman padat dan wilayah perbatasan kota. Data dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon (2024) menunjukkan bahwa sekitar 78% rumah tangga sudah memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar,

namun hanya 54% yang memenuhi kategori sanitasi aman sesuai standar WHO (2022). Tantangan utama meliputi keterbatasan lahan, keterjangkauan biaya pembangunan septic tank, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Hal ini sejalan dengan temuan UNICEF (2021) bahwa urban area di Indonesia sering menghadapi masalah *open defecation* terselubung akibat kurangnya infrastruktur layak, sehingga menghambat pencapaian SDGs poin 6 tentang *clean water and sanitation*. Berdasarkan teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), implementasi strategi kolaboratif di Kota Cirebon dapat diuraikan ke dalam lima dimensi:

## 1. Face-to-face Dialogue

Pemerintah Kota Cirebon rutin mengadakan forum multi-pihak seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Sanitasi Kota. Forum ini mempertemukan organisasi perangkat daerah (OPD), LSM (misalnya Wahana Visi Indonesia), akademisi, serta komunitas masyarakat untuk membahas strategi sanitasi. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa forum ini efektif dalam menyamakan persepsi dan merumuskan langkah bersama terkait sanitasi aman.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ansell & Gash, 2008) yang menegaskan bahwa dialog tatap muka merupakan komponen penting dalam membangun *shared understanding* di antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Penelitian (Kasmad, 2018) di Indonesia juga menekankan bahwa keberhasilan program kolaboratif sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi antaraktor. Selain itu, (Widiastuti, 2019) dalam studi kolaborasi sanitasi di Makassar menemukan bahwa forum multi-pihak mampu memperkuat konsensus kebijakan apabila difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah.

Namun, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa keterlibatan sektor swasta dalam forum masih sangat terbatas. Padahal, menurut (Bryson et al., 2015), kehadiran sektor bisnis dalam forum kolaborasi sangat penting untuk menyediakan sumber daya dan solusi inovatif dalam pembangunan publik. Hal ini menunjukkan perlunya strategi Pemerintah Kota Cirebon untuk lebih aktif mengundang dua usaha dalam perencanaan sanitasi.

## 2. Trust Building

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat setelah keberhasilan program *Sanitasi Aman Berbasis Komunitas*, yang membangun 120 unit septic tank komunal di Kelurahan Panjunan dan Kejaksan. Program ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar mengeluarkan regulasi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata.

Hasil ini konsisten dengan temuan (Emerson et al., 2012) yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya *trust cycle*, yaitu saling percaya yang tumbuh dari keberhasilan kecil yang dicapai bersama. Penelitian (Muhlis et al., 2025) mengenai program sanitasi di Kabupaten Kolaka Timur juga menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi ketika pemerintah daerah mampu menyediakan fasilitas sanitasi yang konkret.

## 3. Commitment to Process

Komitmen Pemerintah Kota Cirebon tampak melalui alokasi anggaran khusus sanitasi dalam APBD dan upaya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski begitu, keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama. Wawancara dengan pejabat teknis menunjukkan bahwa strategi pembiayaan sanitasi membutuhkan sinergi melalui skema CSR perusahaan maupun dukungan lembaga donor.

Penelitian (Ostrom, 2010) tentang *polycentric governance* relevan di sini, bahwa komitmen proses dalam tata kelola kolaboratif memerlukan kontribusi sumber daya dari berbagai pusat kekuasaan, bukan hanya pemerintah. (Indrayanti et al., 2025) juga mencatat bahwa keberhasilan program sanitasi di Tabanan tercapai karena adanya dukungan finansial dari lembaga donor internasional yang melengkapi dana pemerintah.

#### 4. Shared Understanding

Masyarakat Cirebon mulai menyadari bahwa sanitasi aman tidak hanya menyangkut kesehatan pribadi, tetapi juga kualitas lingkungan. Program penyuluhan oleh kader PKK dan posyandu terbukti efektif dalam mengubah perilaku warga, seperti berkurangnya kebiasaan membuang limbah ke saluran terbuka.

Hal ini mendukung teori Health Belief Model (Rosenstock, 1974) yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh kesadaran risiko, manfaat, dan hambatan. Penelitian (Pamungkas et al., 2022) di Surabaya menunjukkan bahwa penyuluhan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke sanitasi aman. Temuan serupa dikemukakan oleh (Heriyanti & Rabbani, 2025) yang menegaskan pentingnya *community-based education* dalam mengubah perilaku sanitasi masyarakat pedesaan.

#### 5. Intermediate Outcomes

Capaian sementara program sanitasi di Cirebon hingga 2024 antara lain:

- Penurunan angka diare berbasis lingkungan sebesar 18% dibanding 2020.
- Peningkatan kepemilikan septic tank kedap dari 42% (2020) menjadi 56% (2024).
- Pembentukan *Forum Kolaborasi Sanitasi Kota*.

Hasil ini mendukung pandangan (UNDP, 1997) tentang *Good Governance* bahwa kolaborasi yang partisipatif dan akuntabel akan menghasilkan *intermediate outcomes* yang konkret. Penelitian (Haryanto, 2020) di Kota Semarang juga menemukan bahwa capaian jangka menengah seperti penurunan penyakit diare merupakan indikator penting keberhasilan strategi sanitasi berbasis kolaborasi.

#### D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan akses sanitasi aman menuju lingkungan sehat tahun 2029 telah menunjukkan capaian positif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Data menunjukkan bahwa 78% rumah tangga telah memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar, namun hanya 54% yang memenuhi kategori sanitasi aman sesuai standar WHO (2022). Ketimpangan akses masih terlihat terutama di kawasan permukiman padat dan wilayah perbatasan kota. Dengan mengacu pada teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), implementasi strategi sanitasi di Kota Cirebon telah mencakup lima dimensi utama, yaitu dialog tatap muka yang difasilitasi melalui forum multi-pihak, peningkatan kepercayaan masyarakat melalui program Sanitasi Aman Berbasis Komunitas, komitmen pemerintah melalui alokasi anggaran dan upaya memperoleh dana tambahan, terbentuknya pemahaman bersama melalui edukasi dan penyuluhan berbasis komunitas, serta capaian sementara berupa penurunan angka diare, peningkatan kepemilikan septic tank kedap, dan terbentuknya Forum Kolaborasi Sanitasi Kota.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi kolaboratif menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam mempercepat pencapaian SDGs poin 6 (*Clean*

*Water and Sanitation*). Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, keterlibatan sektor swasta yang rendah, serta perlunya inovasi pembiayaan dan edukasi berkelanjutan. Dengan demikian, upaya peningkatan sanitasi di Kota Cirebon membutuhkan penguatan pada dimensi partisipasi lintas sektor dan optimalisasi peran aktor non-pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Kota Cirebon perlu memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam forum kolaborasi sanitasi melalui skema *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun pengembangan teknologi sanitasi ramah lingkungan. Kehadiran dunia usaha sangat penting untuk menambah sumber daya dan menciptakan solusi inovatif. Kedua, diperlukan optimalisasi pembiayaan multisumber dengan mengadopsi prinsip *polycentric governance* (Thiel, 2023), di mana pengelolaan sanitasi tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga melibatkan lembaga donor internasional, organisasi masyarakat sipil, dan kontribusi masyarakat melalui mekanisme tabungan atau swadaya.

Ketiga, edukasi dan peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu diperkuat dengan pendekatan *community-based education* yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader PKK, posyandu, tokoh agama, dan media lokal untuk memperluas jangkauan perubahan perilaku. Keempat, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan teknologi, baik dalam bentuk septic tank kedap berbiaya terjangkau maupun pemanfaatan platform digital untuk monitoring capaian sanitasi di tingkat kelurahan. Kelima, Forum Kolaborasi Sanitasi Kota perlu difungsikan secara lebih strategis sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif berbasis data terbuka, sehingga

masyarakat dapat mengakses informasi dan turut mengawal transparansi serta akuntabilitas pembangunan sanitasi di Kota Cirebon.

### REFERENSI

- Afandi, M.N., Novira, A., Anomsari, E.T., Pradesa, H.A. (2024). Applying Collaborative Governance As An Intervention In Stunting Reduction An Empirical Community Empowerment Model In Sukabumi District. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (1), 44 – 64. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i1.50195>
- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Creswell John W. (2014). *Research\_Design*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012a). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012b). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Fadhlurrohman, M., Purnomo, E., Khairina, E., Fathani, A., Salsabila, L., Setiawan, D., & Priyanto, A. (2021). Bibliometrics: Sustainable Clean Water Development And Sanitation Indonesia. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12, 2159–2175.
- Haryanto, J. T. (2020). Collaborative sanitation policy in Semarang City. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2), 145–160.
- Heriyanti, A. P., & Rabbani, T. Z. (2025). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Dusun Begajah, Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 24(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/jkli.24.1.46-58>
- Indrayanti, W., Aisyah, S., Sedyaningih, S., & Terbuka, U. (2025). Collaborative Governance Dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 8(3), 2598–4934. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v8i3.14690>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Miles Matthew B., A. M. H. J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Muhlis, Sabaruddin, A., & Baso, S. (2025). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Atolanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1420–1429. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1316>
- Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. *Global Environmental Change*, 20(4), 550–557. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004>
- Pamungkas, D. S., Fadillah, N. A. Z., Julia, A., & Ferbianty, D. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Layak Bagi Rumah Tangga Di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Jurnal Planologi*, 19(1), 37. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v19i1.19211>
- Purnomo, E., Zamjanah, I., Salsabila, L., & Kencono, D. (2020). *Establishing the Smart City through the Implementation of Smart Environment*. 13, 2020.
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical Origins of the Health Belief Model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335. <https://doi.org/10.1177/10901981740200403>
- Susanthi, D., & Yanuar Purwanto, M. J. (2018). *Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Bogor* (Vol. 13, Issue 1).
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Thiel, A. (2023). Polycentric Governing and Polycentric Governance. In *Polycentrism* (pp. 98–120). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192866837.003.0005>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*.
- Wahyuni, T., Kdod, P., Samarinda, L., & Korespondensi, A. (2020). Memperkuat Responsivitas Penyelenggaraan Paten Di Kecamatan Samarinda Ulu. In *Jurnal Administrative Reform* (Vol. 8, Issue 2).
- Widiastuti, A. (2019). Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Dalam pembangunan Daerah di Kota Serang. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v2i2.7166>